

SKRIPSI

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI DAN MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI SUMATERA SELATAN

(STUDI DI WALHI SUMSEL)



**BAGUS RIZKY Satria WIJAYA
07021281419080**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**

SKRIPSI
PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM
MENANGGULANGI DAN MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN DI SUMATERA SELATAN
(STUDI DI WALHI SUMSEL)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



BAGUS RIZKY Satria WIJAYA
07021281419080

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019

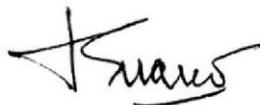
HALAMAN PENGESAHAN

**Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam ~~Menanggulangi dan~~
Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan (Studi
diwalhi Sumsel)**

Diusulkan oleh
Bagus Rizky Satria Wijaya
07021281419080

Telah Disetujui pada tanggal 19 Juli 2019

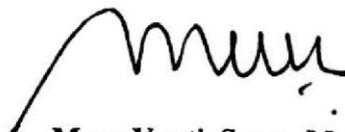
Pembimbing I



Dra. Yusnaini, M.Si.

196405151993022001

Pembimbing II



Mery Yanti, S.sos., M.A.

197705042000122001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menanggulangi dan Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan (Studi di Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan)" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 31 Juli 2019.

Indralaya. Agustus 2019

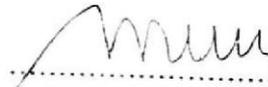
Ketua:

1. Dra. Yusnaini, M.Si.
NIP 196405151993022001

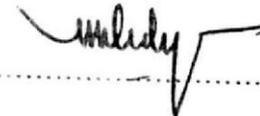

.....

Anggota:

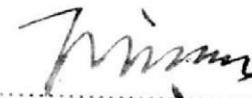
1. Mery Yanti, S.Sos, M.A.
NIP 197705042000122001


.....

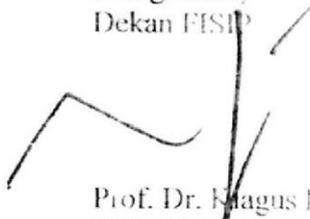
2. Dra. Eva Lidya, M.Si.
NIP. 195910241985032002


.....

3. Dr. Zulfikri Suleman, M.S.
NIP. 195907201985031002

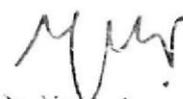

.....

Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Magus Muhammad Sobri, M. Si.
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Sosiologi,



Dr. Yumdyawati, S. Sos., M. Si.
NIP. 197506032000032001

KATA PENGHANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga diberi segala kemudahan dalam penulisan skripsi yang berjudul “**Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menanggulangi dan Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Di Sumatera Selatan (Studi Di Walhi SUMSEL)**”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Proses penulisan skripsi ini tidak bisa selesai tanpa ada bantuan dan kerja sama dari begitu banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan baik ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada keluarga ku, bapakku Sukirman dan Ibu Bunayani, kemudian kakakku tercinta, terima kasih atas segala dukungan yang telah kalian berikan baik secara moril maupun materil. Dan kesabaran dalam menunggu penulis untuk menyelesaikan pendidikan di FISIP Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. H. Anis Saggaf, MSCE selaku rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Ibu Dr. Yunindyawati, S.Sos.,M.Si selaku ketua jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Safira Soraida, S.Sos., M.Sos, selaku sekretaris jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dra. Yusnaini, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan kritik maupun saran selama proses bimbingan berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Mery Yanti, S.Sos., M.A selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan kritik maupun saran selama proses bimbingan berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen FISIP khususnya jurusan Sosiologi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

9. Staff karyawan FISIP yang telah membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan selama menjalani kuliah maupun proses penyusunan skripsi.
10. Terima kasih kepada Kepada Kelurahan Bandar Jaya beserta jajarannya yang telah membantu dan meluangkan waktunya selama proses penelitian berlangsung..
11. Sahabat-sahabat terbaikku Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik, kalian juga tetap semangat dan kekuatan dalam menjalani tahap-tahapan selanjutnya.
12. Teman- teman Sosiologi 2014 seluru teman seperjuangan Sosiologi 2014, baik yang sedang berjuang dengan skripsinya maupun yang telah lulus tetap semangat.

Semoga amal Bapak/Ibu, Saudara, Teman-teman akan senantiasa mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap kiranya apa yang telah dicapai ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat, terima kasih.

Palembang, 27 Juli 2019

Penulis

Bagus Rizky Satria Wijaya

07021281419080

RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menanggulangi dan Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan (Studi di Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan”. Permasalahan pada penelitian ini yaitu untuk melihat dan menganalisa peran WALHI dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera selatan dan ingin mengetahui apa hambatan yang didapat WALHI SumSel dalam menjalankan perannya untuk menanggulangi dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Peran (*Role*) dari David & Julia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peran WALHI Sumsel dalam penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dan ada beberapa hambatan yang didapat WALHI SumSel dalam menjalankan perannya. Bentuk peran yang dilakukan WALHI Sumsel ialah advokasi dan kampanye mengenai penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan hambatan yang didapat WALHI Sumsel berupa hambatan dari eksternal dan internal.

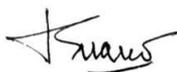
Kata Kunci : Peran LSM WALHI, Kebakaran Hutan dan Lahan, Sumatera Selatan

SUMMARY

This study examines "The Role of Non-Governmental Organizations in Addressing and Preventing Forest and Land Fires in South Sumatra (Study in the Wahana Lingkungan Hidup Selatan)." The problem in this study is to see and analyze the role of WALHI in efforts to mitigate and prevent forest and land fires in South Sumatra and wanted to know what obstacles WALHI SumSel had in carrying out its role in overcoming and preventing forest and land fires. This study used a descriptive qualitative method. The technique of data collection was done by interview observation and documentation. This study used the Role theory of David & Julia. The results of the study show that there are several roles of WALHI Sumsel in the prevention and prevention of forest and land fires in South Sumatra and there are some obstacles that WALHI SumSel has in carrying out its role. The role played by WALHI Sumsel is advocacy and campaigns on the prevention and prevention of forest and land fires. While the obstacles obtained by WALHI Sumsel are external and internal obstacles.

Keywords: Role, Non-Governmental Organizations, WALHI, Forest and Land Fires, South Sumatra Certify.

Advisor I



Dra. Yusnaini, M.Si.
NIP.196405151993022001

Advisor II



Mery Yanti, S.sos., M.A.
NIP. 197705042000122001

*Chairman of Sociology Departement
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University*



Dr. Yunidyawati, S.Sos., M.Si
NIP. 197506032000032001

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	v
Sumarry	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran.....	ix
Daftar Bagan	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritik	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kerangka Pemikiran	13
2.2.1 Tinjauan Tentang Peranan	13
2.2.2 Lembaga Swadaya Masyarakat	17
2.2.3 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia SumSel (WALHI)	21
2.2.4 Kebakaran Hutan dan Lahan	23
2.2.5 Konsep Teori Peranan.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Strategi Penelitian	30
3.4 Fokus Penelitian	30
3.5 Jenis dan Sumber Data	31
3.6 Penentuan Informan	32

3.7 Peranan Penelitian	32
3.8 Unit Analisis	33
3.9 Teknik Pengumpulan Data	33
3.10 Teknik Keabsahan Data	35
3.11 Teknik Analisis Data	36
3.12 Jadwal Penelitian	37

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan	38
4.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah	38
4.2. Gambaran Umum WALHI SUMSEL	40
4.2.1 Sejarah Singkat WALHI SUMSEL	40
4.2.2 Visi dan Misi WALHI SUMSEL	41
4.2.3 Struktur Organisasi	42
4.3 Gambaran Umum Informan	50

BAB V PEMBAHASAN

5.1 Peran WALHI SUMSEL dalam Menanggulangi dan Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan	54
5.1.1 Advokasi	59
5.1.2 Kampanye	61
5.2 Hambatan WALHI Sumsel dalam Menanggulangi dan Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan	62
5.2.1 Hambatan Eksternal	63
5.2.2 Hambatan Internal	64

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 5.1 Profil Informan Utama	52
---------------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	40
---	----

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah menjadi bencana rutin tahunan. Pada setiap tahunnya beberapa provinsi di Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan, walaupun angka rendah dan tingginya penyebaran titik api selalu berbeda pada setiap tahunnya. Dalam dasawarsa terakhir kebakaran hutan dan lahan di Indonesia semakin meningkat dan menimbulkan banyak masalah lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi baik di Indonesia maupun di negara tetangga (Schwethelm 1998, Dennis 1999, Hoffman *et al* 1999). Pada tahun 1997/1998, sekitar 9,7 juta hektar hutan dan lahan yang terbakar dan dampak dari kebakaran dan asap itu sendiri telah mempengaruhi 75 juta orang. Kerugian ekonomi di perkirakan mencapai USD 3 miliar (Tacconi 2002).

Awal mulanya kebakaran hutan dan lahan khususnya di Indonesia di anggap terjadi karena gejala alam seperti gunung meletus atau sambaran petir, tetapi manusia juga memiliki peran dalam memulai kebakaran pada dasawarsa terakhir. Pembangunan dan pembukaan lahan pertanian atau perkebunan yang tidak benar serta fenomena iklim *el nino* menjadi penyebab kabakaran hutan dan lahan terbesar pertama yang menghancurkan 3,2 juta Ha, dimana 2,7 juta Ha merupakan hutan tropis (Schinder dkk, 1989). Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada tahun 1997-1998 kebakaran hutan dan lahan yang besar kembali terjadi dan diperkirakan 13 juta Ha hutan dan lahan hangus terbakar. Sedangkan menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 9,7 juta Ha (BBC Indonesia 2015). Di tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan yang besar kembali terjadi, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan total luas kebakaran hutan 2,61 Ha (Kontan.co.id, 2016). Di Indonesia sendiri terdapat beberapa provinsi yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Pada rentan waktu 15 tahun terakhir, sebagian besar kebakaran hutan di Indonesia terjadi di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Riau.

Dalam periode 6 tahun terakhir provinsi Sumatera Selatan mengalami kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya. Berdasarkan data rekapitulasi titik panas dalam periode 2010 hingga 2015 ada kecenderungan terjadi peningkatan titik panas tahunan per kabupaten. Selama periode tersebut titik panas paling tinggi mencapai 27.043 di tahun 2015. Di tahun 2014 Sumatera Selatan dari total *hot spot* 7.234 ditemukan 4.229 titik panas di Kabupaten OKO, 617 titik panas di K abupaten Musi Banyuasin, 494 titik panas di Kabupaten Muara Enim dan 436 di

Kabupaten Banyu Asin. Data penyebaran titik panas tahun 2014 menunjukkan 40% titik panas terdapat di Hutan Produksi (HP), 34% di perkebunan, 7% di Hutan Lindung (HL), 5% di pertanian, 5% di Hutan Produksi Konversi (HPK), selebihnya 9% di Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Suaka Alam dan pemukiman (UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan, 2015). Sementara data yang terekam dalam Laporan Kegiatan Pengawasan Pemantauan Kebakaran Lahan dan Kebun tahun 2014 menunjukkan bahwa di Sumatera Selatan, di kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) terdapat titik panas 0,92%, kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) 17,9%, di kawasan perkebunan 8,46% dan sisanya 72,71% di APL (Ditjen Perkebunan, 2014). Pada kejadian Karhutla tahun 2015 di Sumatera Selatan, jumlah total titik panas mencapai 27.043 yang tersebar di tiga kabupaten terbanyak yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 16.008 titik panas, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) 5.249 titik panas, dan Kabupaten Banyuasin 1.665 titik panas. Pada Gambar 2 tampak bahwa tiga kabupaten yang cenderung memiliki titik panas tahunan terbesar adalah Kabupaten OKI, Kabupaten Muba dan Kabupaten Banyu Asin. Kejadian Karhutla di Sumatera Selatan baik tahun 2014 maupun tahun 2015 menunjukkan bahwa titik panas dominan ditemukan di Kabupaten OKI, Kabupaten Muba dan Kabupaten Banyu Asin. Hasil pantauan Karhutla tahun 2105 oleh UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) Provinsi Sumatera Selatan bahwa di kedua kabupaten tersebut titik panas senantiasa eksis berbulan-bulan.

Di tahun 2015 kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan bahwa titik panas terbanyak di temukan di Kabupaten OKI yaitu 16.008 titik atau sebanyak 59% dari total titik api. Berdasarkan penafsiran citra satelit bahwa luas areal terbakar lebih dari 50% terjadi di wilayah Kabupaten OKI seluas 377.467 hektar. Ini menunjukkan ada korelasi antara jumlah titik *hot spot* dengan luas areal terbakar. Titik panas selama ini dijadikan sebagai indikator kejadian kebakaran, meskipun tidak selamanya titik panas yang terekam dalam citra satelit menunjukkan terjadinya kebakaran. Namun secara kualitas biasanya jumlah titik panas yang bergerombol, disertai asap dan terpantau terjadi berulang menunjukkan adanya kejadian kebakaran di suatu wilayah (Lapan, 2016). Dengan demikian data titik panas hingga saat ini masih digunakan sebagai cara paling efektif dalam memantau kebakaran untuk wilayah luas secara cepat (*near real time*).

Berdasarkan hasil perhitungan digitasi Citra Satelit Landsat bahwa luas hutan dan lahan terbakar tahun 2015 di Sumatera Selatan mencapai 736.587 hektar. Dari total luas areal terbakar di Sumatera Selatan sebanyak 51,23% atau seluas 377.367 hektar terdapat di wilayah Kabupaten OKI. Areal terbakar di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi

Banyuasin berturut-turut adalah 141.124 hektar dan 108.329 hektar (UPTD PKHL Provinsi Sumatera Selatan, 2015). Dalam periode 2000-2016 kejadian Karhutla di Sumatera Selatan dominan terjadi di Kabupaten OKI, Kabupaten MUBA dan Kabupaten Banyu Asin. Hal ini terkait dengan kondisi lahan gambut yang ada. Identifikasi karakteristik gambut pernah dilakukan dalam *South Sumatera Forest Fire Management Project (SFFMP)-Europe Union* pada tahun 2008 menghasilkan data tentang lahan gambut di Sumatera Selatan mencapai 1.476.335 hektar dengan 653.726 hektar lahan gambut memiliki kecenderungan menyerupai kubah gambut (*peat dome*) yang dominan berada di Kabupaten OKI dan Kabupaten Muba, sebagian kecil di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim. Lahan gambut lainnya (*non peat dome*) seluas 822.609 hektar tersebar di Kabupaten OKI, Kabupaten Muba dan Kabupaten Banyuasin (SSFFMP, 2008 dalam BKSDA Sumatera Selatan, 2015).

Disamping kondisi lahan berupa gambut, ketiga kabupaten ini juga memiliki luas wilayah yang relatif luas dengan keberadaan desa. Dari 443 desa dengan kategori rawan kebakaran hutan sebanyak 32% terdapat di Kabupaten OKI, 29% terdapat di Kabupaten MUBA. Adapun dari 59 desa sangat rawan kebakaran sebanyak 76% terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan demikian nampak ada kecenderungan hubungan antara jumlah titik panas dan keberadaan desa rawan/sangat rawan kebakaran. Selain kondisi lahan berupa gambut, keberadaan masyarakat khususnya di lahan gambut wilayah OKI ini dimulai sejak tahun 1970 dimana saat itu ada Program Transmigrasi Lahan Basah. Adapun pada tahun 2000-an, investor mulai masuk membuka usaha perkebunan sawit (Martin & Winarno, 2010). Keberadaan masyarakat ini berpotensi dalam pencetus kebakaran, disamping perusahaan. Dahulu pencetus kebakaran hutan alam berupa faktor alam seperti petir namun sekarang kebakaran terjadi dimulai oleh manusia terkait dengan perubahan penggunaan lahan (Baker & Bunyavejchewin, 2009 dalam Cattau, 2016). Selain dari kondisi biosfer dan keberadaan masyarakat, sebenarnya pengaruh iklim dan cuaca memperkuat kebakaran di lahan gambut. Pengaruh cuaca yakni kekeringan juga mempengaruhi kebakaran di lahan gambut.

Dari hasil penelitian Putra, Hayasaki, Takashi, & Usup (2008) di area Pembukaan Lahan Gambut (PLG) bahwa setelah 11-14 hari mengalami kekeringan dan jika tinggi permukaan air di lahan gambut menurun hingga 20cm di bawah permukaan lahan gambut maka kebakaran permukaan lahan gambut dapat terjadi. kebakaran ini semakin hebat saat kekeringan tidak normal dengan datangnya musim kemarau yang dipengaruhi *El Nino*. Pada tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan di provinsi Sumatera Selatan membakar sekitar 608 ribu Ha, menjadikan provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan terluas pada tahun 2015. Tidak hanya itu provinsi Sumatera Selatan pun mendapatkan

kerugian yang terbanyak akibat kebakaran hutan dan lahan melebihi provinsi lainnya. Di perkirakan kerugian yang dialami provinsi Sumatera Selatan mencapai 53,8 triliun pada 2015. Sedangkan menurut Rully Syamanda (2003), menyebutkan ada 4 aspek yang terindikasi sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan, diantaranya mencakup dampak terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, dampak terhadap hubungan antara negara, serta dampak terhadap perhubungan dan pariwisata. Melihat dari banyaknya dampak yang merugikan akibat dari kebakaran hutan dan lahan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan baik dalam bentuk peraturan maupun program akan tetapi kebakaran hutan dan lahan masih saja terjadi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan masalah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diantaranya kesulitan dalam koordinasi antar lembaga terkait (Subarudi, 2002; Simorangkir & Sumantri, 2002); belum ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab di antara lembaga yang sesuai (Subarudi, 2002; Simorangkir & Sumantri, 2002), bentuk lembaga bersifat *ad hoc* (Simorangkir & Sumantri, 2002), kebijakan pengendalian hutan dan lahan belum terpadu (Simorangkir & Sumantri, 2002), lemahnya penegakan hukum (Subarudi 2002; Simorangkir & Sumantri, 2002), dan anggaran terbatas (Novra & Farias, 2008). Selain itu lembaga formal yang di bentuk pemerintah untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan belum efektif dan maksimal. Adapun keberadaan Manggala Agni dan satuan Manggala Agni Reaksi Taktis masih terbatas (Saharjo & Yungan, 2014).

Terlepas dari kurang efektif dan maksimalnya lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, terdapat juga lembaga non-pemerintahan yang ikut berperan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan khususnya di Sumatera Selatan. Salah satu lembaga non-pemerintahan di provinsi Sumatera Selatan yang aktif berperan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ialah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang independen dan non-profit. WALHI memiliki beberapa cabang di setiap provinsinya. Di Sumatera Selatan terdapat juga WALHI SUMSEL yang tugas dan programnya sama dengan WALHI pusat namun di sesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing mengenai masalah lingkungan hidup. WALHI SUMSEL sendiri sudah lama ikut berperan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Salah satu komitmen

Walhi Sumsel dapat kita lihat melalui artikel yang terdapat pada laman *website* Walhi Sumsel, yang berjudul “Menagih Komitmen Pemerintah Jokowi-JK dalam Mempercepat Pemulihan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan”. Dalam artikelnya ini Walhi Sumsel membuat beberapa point tuntutan dan menagih kepada pemerintahan Jokowi-JK salah satu tuntutan Walhi Sumsel ialah “Mengeluarkan paksaan pemerintah kepada seluruh pelaku Karhutla yang areal izinnya terjadi Karhutla 2015 untuk melakukan pemulihan dan pencegahan permanen sebagaimana sesuai dengan aturan, dengan total luas lebih kurang 1,4 Juta Ha melalui Menteri LHK dan mempublikasinya kepada publik”.Melihat pernyataan tuntutan Walhi Sumsel, memang Walhi Sumsel menaruh perhatian serius dan berperan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan khususnya.

Belajar pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 lalu, WALHI kembali mengajak public untuk tidak lupa atas tragedi yang telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup dan lahan tahun 2015 itu telah mengakibatkan 24 orang meninggal dunia, lebih dari 600 ribu jiwa terpapar asap, seluas 2,6 juta hektare hutan dan lahan terbakar yang mengakibatkan kerugian sebesar 221 Triliun rupiah, negara pun harus mengeluarkan dana sebesar 720 milyar untuk mengatasi kebakaran (BNPB,2015). Berdasarkan uraian di atas, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan tidak dapat bergantung kepada peran pemerintah, lembaga non-pemerintah juga harus ikut berperan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, karena kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian tidak hanya dari segi ekonomi, sosial, dan budaya tetapi dari sektor ekologi juga merugikan. Untuk itu selaras dengan salah satu tujuan WALHI yang ingin menciptakan keadilan ekologi maka Walhi harus berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan agar tujuan keadilan ekologi tercapai. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti “Peran LSM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan “ (Studi Kasus Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan (WALHI) terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan ?

2. Apa hambatan WALHI dalam melakukan pecegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) WALHI SUMSEL dalam penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) WALHI SUMSEL dalam penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.
- b) Untuk mengetahui hambatan yang di alami oleh WALHI dalam melakukan pecegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu-ilmu sosial, pada khususnya mata kuliah Sosiologi Lingkungan, Sosiologi organisasi, etika sosial dan Gerakan sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, sekaligus untuk mengetahui, sejauh mana kemampuan penulisi dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Indralaya.
- b) Secara Praktis, sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat Umum. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengambil kebijakan yang bersangkutan dengan kebakaran hutan dan lahan dapat lebih diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Rujukan Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Praktek Jilid II Cet XIX
Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kencana Predana Media Group, Jakarta,*
2011.
- BNPB. (2016) *Evaluasi Penanggulangan Bencana 2015 Dan Prediksi Bencana 2016*. Jakarta:
BNPB
- Barry, David, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Jakarta : CV Rajawali Pers. 1984.*
- Creswell, John W. 2009. *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan
Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penerjemah Achmad Fawaid.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five
Traditions*. California: Sage Publication.
- Henselin, James M, *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi, Jilid I, edisi ke 6 Jakarta:*
Erlangga, 2006.
- Horton, Paul B, *Sosiologi, jilid I, edisi ke 6, Jakarta: PT Erlangga, 1999*
- KLHK. (2016). *Rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (ha) per provinsi di Indonesia
dan tahun 2011-2016*. Jakarta KLHK.
- Lapan. (2016). *Informasi titik panas (hotspot) kebakaran hutan/lahan*. Jakarta: Lapan.
- Fakih, M. 2000. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM
Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Offset.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Saidi, Zaim, *Secangkir Kopi Max Havelaar (LSM dan Kebangkitan Masyarakat)*, Jakarta :PT
Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Simorangkir, D., & Sumantri. (2002). *A review of legal, regulatory and institutional aspects of forest and land fires in Indonesia*. Bogor.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Jurnal

Ardian, 2010. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pendidikan Penanggulangan Bencana Alam Pada Kelompok Karang Taruna Di Kabupaten Majalengka*.
<http://www.garuda.dikti.go.id>. Diakses pada 09/03/2019 20.31 WIB.

Barus, Lorencia P. 2013. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Memberikan Wawasan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan*.
<http://www.garuda.dikti.go.id>. Diakses pada 08/03/2019 22.02

Hasani, Furqon. 2015. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam Pada Masyarakat Kabupaten Bantul*. www.ejournal.unesa.ac.id. Diakses pada 09/03/2019 19.47 WIB.